

Dominasi Kekuasaan dan Praktik Korupsi Dana Desa di Indonesia: Tinjauan Sistematis Literatur

Domination of Power and Corruption Practices in Village Fund Management in Indonesia: A Systematic Literature Review

Raida Devany Fernanda¹, Ardi Maulana Nugraha²

¹⁻²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

e-mail: raida23001@mail.unpad.ac.id¹, ardi.maulana@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertujuan untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, besarnya dana yang dikelola di tingkat desa juga meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali dan menganalisis keterkaitan antara dominasi kekuasaan dengan praktik korupsi dana desa di Indonesia menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Metode penelitian mengikuti panduan PRISMA dengan menelaah artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2021-2026 dan diperoleh dari database Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Analisis dilakukan dengan sintesis tematik untuk menemukan pola serta tema yang muncul secara berulang dalam literatur. Hasil kajian menunjukkan lima tema utama yang berkaitan dengan korupsi dana desa, yakni mengenai dominasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran, relasi kuasa dengan elit lokal, lemahnya pengawasan dan asimetri informasi, rendahnya partisipasi masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi dana desa tidak hanya muncul dari faktor individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan serta lemahnya sistem tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, tindakan pencegahan korupsi harus dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas di tingkat lokal.

Kata kunci: korupsi dana desa, dominasi kekuasaan, tata kelola desa, transparansi, partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Village Funds, provided by the government under Law Number 6 of 2014, aim to promote development and enhance community empowerment in rural areas. However, the substantial amount of funds managed at the village level also increases the potential for corruption. This study aims to identify and analyze the relationship between power domination and corruption in village funds in Indonesia using a Systematic Literature Review (SLR) approach. The research method follows the PRISMA guidelines by reviewing scientific articles published between 2021 and 2026 and obtained from the Google Scholar, Garuda, and SINTA databases. The analysis was conducted using thematic synthesis to identify recurring patterns and themes in the literature. The findings reveal five main themes associated with village fund corruption, namely the dominance of village heads in budget management, power relations with local elites, weak oversight and information asymmetry, and low community participation. These findings indicate that village fund corruption is not only caused by individual factors but is also influenced by power structures and weaknesses in village governance systems. Therefore, corruption prevention efforts should focus on strengthening oversight mechanisms, enhancing the function of the Village Consultative Council (BPD), and improving transparency in village financial management to strengthen accountability at the local level.

Keywords: Village Fund Corruption, Power Domination, Village Governance, Transparency, Community Participation

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa memberi lebih banyak kebebasan untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan untuk desa. Dengan peningkatan otoritas, pemerintah desa juga lebih bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya dan anggaran pembangunan. Mahirdi dkk (2021) menunjukkan bahwa otonomi desa masih menghadapi masalah seperti penyelewengan anggaran, penegakan hukum yang masih lemah, dan rendahnya kapasitas aparatur desa.

Pengelolaan Dana Desa menimbulkan masalah terkait dengan kemampuan aparatur serta sistem pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran. Sutarna dan Subandini (2023) menjelaskan, ketika pengawasan publik di tingkat desa lemah, elit lokal dapat mengontrol proses pembangunan karena asimetri informasi antara masyarakat sebagai prinsipal dan elit desa sebagai agen. Korupsi dana desa dikaitkan dengan birokrasi yang tidak transparan, kurangnya akuntabilitas dan pengawasan, serta kualitas sumber daya aparatur yang rendah (Gunawan dan Bahari, 2024).

Kencana et al, 2024. Menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam mencegah penyalahgunaan dana desa adalah kurangnya pemahaman hukum aparat dan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi dana desa tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, masalah ini juga terkait dengan kemampuan aparatur, kurangnya pengawasa, ketidakjelasan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Korupsi dalam sosiologi dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, tetapi juga sebagai akibat dari relasi sosial dan struktur kekuasaan yang ada di masyarakat.

Menurut Bourdieu (1986) kekuasaan seorang aktor tidak hanya berasal dari otoritas formal, tetapi juga dari modal sosial dan simbolik. Kedua modal ini muncul melalui jaringan relasi dan pengakuan sosial di sekitar aktor. Kerangka ini relevan untuk memahami mengapa kepala desa, selain memegang tanggung jawab administratif untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, seringkali juga memiliki kekuatan sosial dan politik yang memperkuat posisinya, yang membuat sulit untuk diimbangi oleh mekanisme pengawasan formal.

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa dominasi kepala desa dan relasi kekuasaan adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan saat memahami kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitiannya mengenai relasi kuasa di desa, Lamabelawa, Lazzar, Tokan, dan Niron (2024) menemukan bahwa kepala desa memiliki otoritas formal yang kuat untuk menentukan prioritas pembangunan dan pengelolaan anggaran, sementara BPD (Badan Permusyawaratan Desa) lebih banyak bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengesahkan RAPBDes, sehingga masyarakat tidak dapat terlibat secara aktif dalam musyawarah desa.

Sementara Wilyanti, Soliha, Khalimy, dan Dzikrullah (2025) menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat di Ciwaringin, Cirebon dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa, seperti pemalsuan data anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas resmi kepala desa dan kurangnya sistem pengawasan dapat berhubungan satu sama lain, memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola dana desa.

Relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan kelompok elit lokal mempengaruhi cara pengelolaan dana desa. Thareq dan Apriani (2024) menemukan bahwa hubungan kuasa antara pemerintah desa dan kelompok elit masyarakat, konflik ekonomi politik dan perbedaan kewenangan antaraktor mempengaruhi pemanfaatan dana desa selama era *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sehingga, anggaran mungkin digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyimpangan dana desa dapat berasal dari hubungan antarelit lokal bukan hanya tindakan tunggal kepala desa. Pemahaman tentang dominasi kekuasaan sangat penting untuk memahami bagaimana sumber daya dan kewenangan desa dapat digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Penguatan sistem pengawasan dan keterlibatan masyarakat adalah bagian dari upaya mencegah korupsi dana desa. Arasid (2026) menyatakan bahwa untuk mitigasi korupsi dana desa diperlukan pengawasan, transparansi, partisipasi masyarakat, keterbukaan akses informasi, akuntabilitas, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dominasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran desa, mengidentifikasi hubungan kuasa antara pemerintah desa dan elit lokal, juga mengkaji kekurangan pengawasan dan asimetri informasi yang dapat menyebabkan penyimpangan dana desa. Selain itu penelitian ini melihat rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan sebagai faktor lain yang meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi dana desa. Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang hubungan antara struktur kekuasaan, sistem pengawasan, partisipasi masyarakat, dan praktik korupsi dalam pengelolaan dana desa di Indonesia melalui tinjauan literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi, menilai, dan menggabungkan hasil-hasil penelitian yang membahas dominasi kekuasaan dan praktik korupsi dana desa di Indonesia. SLR adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu topik penelitian dibandingkan dengan tinjauan literatur tradisional (Delgado-Rodríguez dan Sillero-Arenas, 2018). Penelitian ini menggunakan SLR dengan pedoman *Preffered Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses* (PRISMA), yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi artikel dalam tinjauan sistematis (Moher et al., 2009).

Artikel yang digunakan mencakup jurnal nasional berbahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2021-2026 yang membahas korupsi dana desa, dominasi atau relasi kekuasaan dalam pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Artikel dapat diakses melalui sumber resmi dan memiliki metode dan temuan penelitian yang jelas. Proses pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti “korupsi dana desa”, “dominasi kekuasaan dan korupsi dana desa”, “kekuasaan korupsi dana desa”, dan “pengelolaan dana desa”.

Hasil penelusuran awal menunjukkan 40 artikel yang relevan. Selanjutnya, proses penyaringan dilakukan untuk memastikan bahwa judul, abstrak, dan isi artikel sesuai, lalu artikel yang tidak memenuhi kriteria

akan dihapus. Kriteria artikel yang digunakan yaitu diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, membahas korupsi dana desa, dominasi atau relasi kekuasaan dalam pemerintahan desa, pengelolaan dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Hasil seleksi akhirnya menghasilkan 10 artikel yang layak untuk dianalisis. Selanjutnya, data diekstraksi dan disintesis menggunakan teknik sintesis tema untuk menemukan tema utama mengenai dominasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran, relasi kuasa dengan elit lokal, lemahnya pengawasan dan asimetri informasi, rendahnya partisipasi masyarakat.

Tahap PRISMA	Deskripsi	Jumlah
Identifikasi	Artikel yang ditemukan dari Google Scholar sebelum penghapusan duplikasi	40
Penyaringan (screening)	Artikel yang sudah melalui proses penghapusan duplikasi dan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak	22
Penilaian Kelayakan (eligibility)	Artikel yang dibaca secara penuh dan sesuai dengan kriteria penelitian	10
Inklusi (included)	Artikel akhir yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis	10

Sumber: Olahan peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tabel literatur review menunjukkan bahwa korupsi dana desa tidak hanya disebabkan oleh faktor individu. Penyalahgunaan dana desa dapat terjadi karena beberapa faktor, termasuk dominasi kepala desa, hubungan dengan elite lokal, kurangnya pengawasan dan transparansi, ketimpangan informasi, dan rendahnya partisipasi Masyarakat.

Dalam artikel ini yang berjudul Dominasi Kekuasaan dan Praktik Korupsi di Indonesia: Tinjauan Sistematis Literatur, temuan tersebut memberikan dasar untuk melihat korupsi dana desa sebagai masalah struktural, bukan hanya karena individu. Urgensi artikel ini terletak pada upaya menyintesis penelitian yang membahas kekuasaan, pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Artikel ini memberikan pemahaman tentang bagaimana dominasi kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan partisipasi dapat meningkatkan peluang korupsi dana desa.

Dominasi Kepala Desa dalam Pengelolaan Anggaran

Dalam literatur yang diteliti, dominasi kepala desa dalam pengelolaan dana desa adalah tema yang paling menonjol. Lazar, Tokan, dan Niron (2024) menemukan bahwa kepala desa Lamabelawa memiliki wewenang formal untuk menentukan prioritas pembangunan dan anggaran desa. Namun, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) hanya bertanggung jawab atas tahap RAPBDes, sehingga ruang bagi warga untuk berpartisipasi dalam musyawarah desa masih terbatas.

Table 1. Matriks Ekstraksi Literatur SLR

N o.	Penulis	Judul	Temuan Relevan
1	Lazar, Tokan, Niron (2024)	Relasi Kuasa Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lamabelawa.	Pengelola keuangan Lambelawa menunjukkan relasi kuasa yang dinamis. Kepala Desa memiliki wewenang formal untuk menetapkan prioritas pembangunan dan anggaran, sementara BPD bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengesahkan RAPBDes
2	Wiyanti, Soliha, Khalimy, & Dzikirullah (2025)	Analisa Hukum Korupsi APBDes dan Penyalahgunaan Kekuasaan Kepala Desa Ciwaringin Cirebon	Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat tidak melakukan pengawasan yang lemah memungkinkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa. Kurangnya pengawasan memungkinkan pengelola dana desa melakukan pemalsuan data kebutuhan anggaran, yang menyebabkan informasi tidak akurat tentang dana dan alokasinya.
3	Mahriadi, Agustang, Idhan, & Rifdan (2021)	Korupsi Dana Desa: Problematika Otonomi Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Penyelewengan anggaran, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kapasitas aparatur desa terus menyebabkan korupsi dana desa. Peningkatan otonomi desa harus disertai dengan peningkatan kapasitas aparatur, pendampingan, keterlibatan Masyarakat dalam pembangunan desa, dan penyusunan anggaran secara partisipatif.
4	Novryan & Ilmar (2024).	Kuasa Kepala Desa Atas Dana Desa di Desa Sodong Kabupaten Pandeglang	Penelitian menggunakan perspektif hegemoni Antonio Gramsci untuk menjelaskan modus kepala desa dalam mengelola dana desa, terutama bagaimana kekuasaan dan pengaruh kepala desa dapat digunakan dalam praktik pengelolaan dana desa..
5	Al. K, Kencana, Pratama M, & Kautsar S (2024)	Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa	Partisipasi Masyarakat penting untuk mencegah korupsi dana desa. Salah satu masalahnya adalah pejabat desa dan masyarakat tidak memahami hukum, sehingga diperlukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pengelolaan dana desa serta tindak pidana korupsi.
6	Arasid (2026)	Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur	Korupsi dana desa dipengaruhi lemahnya pemahaman antikorupsi serta adanya motivasi, tekanan, dan peluang koruptif. Pengawasan, partisipasi, transparansi, akses informasi, dan akuntabilitas dapat memitigasinya.
7	Suryawarda ni & Ansori (2025)	Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dengan Pengelolaan Dana Desa (Desa Tegalwaru , Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor)	Pengelolaan dana desa Tegalwaru dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan inovatif progresif kepala desa. Keputusan yang berorientasi pada masyarakat dan melibatkan masyarakat menunjukkan pengelolaan yang baik.
8	Subhan & Apriani (2024)	Dinamika Akuntabilitas Dana Desa di Era Sustainable Development Goals.	Penggunaan dana desa dapat dipengaruhi oleh hubungan kuasa antara pemerintah desa dan kelompok elit masyarakat, konflik ekonomi-politik, dan perbedaan kewenangan antaraktor. Relasi dapat mempengaruhi pemanfaatan dana desa untuk kepentingan kelompok tertentu.
9	Sutarna & Subandi (2023)	Korupsi Dana Desa dalam Perspektif Principal-Agent	Korupsi dana desa dapat dipicu oleh asimetri informasi dan lemahnya pengawasan publik, sehingga elite lokal memiliki kontrol lebih besar atas informasi dan proses pembangunan.
10	Indra & Bahari (2024)	Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Study Literatur)	Korupsi dana desa dianggap sebagai bentuk disfungsi sistem sosial karena kegagalan memenuhi fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Faktor penyebab korupsi ini termasuk birokrasi yang tidak transparan, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas, serta SDM aparatur desa.

Sumber: olahan penulis

Temuan ini diperkuat oleh perspektif hegemoni Gramsci. Menurut Novryan dan Ilmar (2024) di Desa Sodong, menunjukkan bahwa kekuasaan kepala desa diperkuat oleh kewenangan administratif dan pengaruh sosial, yang menyebabkan warga serta perangkat desa cenderung tunduk pada keputusan kepala desa saat mengelola dana desa. Wiyanti, Soliha, Khalimy, dan Dzikrullah (2025) menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat di Ciwaringin, Cirebon memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa, termasuk pemalsuan data kebutuhan anggaran yang menyebabkan informasi yang tidak akurat tentang dana desa dan alokasinya.

Sebaliknya, Suryawardani dan Ansori (2025) menunjukkan bahwa cara pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Kepala desa Tegalwaru yang mengadopsi gaya kepemimpinan inovatif progresif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik. Hasil menunjukkan dominasi kekuasaan kepala desa dapat menyebabkan penyimpangan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan partisipasi yang cukup. Tetapi, jika kekuasaan tersebut diarahkan secara partisipatif maka tata kelola dapat menjadi lebih baik.

Temuan ini diperkuat oleh perspektif hegemoni Gramsci. Menurut Novryan dan Ilmar (2024) di Desa Sodong, menunjukkan bahwa kekuasaan kepala desa diperkuat oleh kewenangan administratif dan pengaruh sosial, yang menyebabkan warga serta perangkat desa cenderung tunduk pada keputusan kepala desa saat mengelola dana desa. Wiyanti, Soliha, Khalimy, dan Dzikrullah (2025) menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat di Ciwaringin, Cirebon memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa, termasuk pemalsuan data kebutuhan anggaran yang menyebabkan informasi yang tidak akurat tentang dana desa dan alokasinya.

Sebaliknya, Suryawardani dan Ansori (2025) menunjukkan bahwa cara pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala desa. Kepala desa Tegalwaru yang mengadopsi gaya kepemimpinan inovatif progresif dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, menghasilkan pengelolaan dana desa yang baik. Hasil menunjukkan dominasi kekuasaan kepala desa dapat menyebabkan penyimpangan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan partisipasi yang cukup. Tetapi, jika kekuasaan tersebut diarahkan secara partisipatif maka tata kelola dapat menjadi lebih baik.

Relasi Kuasa dengan Elite Lokal

Selain dominasi kepala desa, hubungan kekuasaan antara pemerintah desa dan kelompok elit lokal juga mempengaruhi penyimpangan dana desa. Thareq dan Apriani (2024) menemukan bahwa dinamika akuntabilitas dana desa di era *Sustainable Development Goals* sangat dipengaruhi oleh hubungan kuasa antara pemerintah desa dan kelompok elit masyarakat, perbedaan kewenangan antar aktor, dan konflik kepentingan ekonomi politik menyebabkan dana desa mungkin terarah pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan umum warga. Studi yang ditulis oleh Novryan dan Ilmar (2024) memperkuat temuan karena menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan dan kedekatan pribadi ada dalam struktur pemerintahan desa. Kaur Keuangan adalah anak kepala desa, sedangkan bendahara merupakan istri Kaur Keuangan sekaligus menantu kepala desa.

Kondisi ini membuat akses dan kontrol terhadap dana desa lebih mudah, terutama ketika kepala desa lebih banyak melibatkan perangkat yang dekat dan dapat diandalkan serta membatasi keterlibatan perangkat lainnya. Hal ini sejalan dengan kerangka modal sosial dan modal simbolik Bourdieu (1986). Kerangka ini menjelaskan bahwa jaringan relasi dan pengakuan sosial

dapat mendukung kekuasaan aktor, sehingga aktor tidak sepenuhnya bergantung pada otoritas formal. Melalui jaringan kekuasaan yang ada di dalam struktur pemerintahan desa, elit lokal dapat masuk ke dalam proses pengelolaan anggaran.

Lemahnya Pengawasan dan Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan transparansi adalah faktor yang memungkinkan korupsi dana desa berlanjut. Menurut Sutarna dan Subandi (2023), asimetri antara prinsipal dan agen menyebabkan korupsi, elite lokal mengkapitalisasi proses pembangunan dengan memiliki akses ke informasi. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya mekanisme pengawasan publik di tingkat lokal menyebabkan korupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa elit lokal memiliki lebih banyak kontrol atas proses pembangunan. Ketika informasi tentang pengelolaan pembangunan tidak tersebar secara merata dan mekanisme pengawasan publik tidak tersedia.

Gunawan dan Bahari (2024) menjelaskan melalui perspektif struktural fungsional Talcott Parsons, bahwa birokrasi yang tidak transparan, kurangnya akuntabilitas, pengawasan, dan sumber daya yang buruk adalah semua faktor yang berkontribusi pada korupsi dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan pengawasan adalah komponen penting dalam mencegah penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil kedua penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi, birokrasi yang tidak transparan, dan kekurangan sistem pengawasan publik adalah masalah yang saling berhubungan yang meningkatkan kemungkinan korupsi dana desa.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah instrument penting untuk mencegah korupsi,

tetapi penelitian menunjukkan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam pengawasan dana desa. Kencana dkk (2024) menemukan bahwa kurangnya pemahaman hukum aparat desa dan masyarakat adalah salah satu hambatan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa. Maka, sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pengelolaan dana desa harus terus dilakukan. Arasid (2026) menyatakan bahwa untuk mengurangi korupsi dana desa, diperlukan pengawasan yang lebih partisipatif, transparansi, keterbukaan akses informasi, dan akuntabilitas. Masyarakat juga perlu untuk meningkatkan kesadaran antikorupsi. Hasilnya menunjukkan bahwa menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel dapat menjadi tantangan karena rendahnya pemahaman masyarakat dan kurangnya keterlibatan warga dalam pengawasan.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis dari 10 artikel yang diterbitkan pada 2021-2026, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dana desa di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai tindakan individu saja, tetapi berkaitan juga dengan struktur kekuasaan dan relasi sosial di tingkat lokal. Dalam analisis ini ditemukan lima tema utama yang telah disebutkan berulang dalam literatur, yaitu dominasi kepala desa dalam pengelolaan anggaran, relasi kuasa dengan elit lokal, lemahnya pengawasan dan asimetri informasi, rendahnya transparansi pengelolaan keuangan desa, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Kelima faktor tersebut berkaitan satu sama lain dan menciptakan situasi yang memungkinkan penyimpangan dana desa. Penyalahgunaan kekuasaan dapat lebih mungkin terjadi ketika kepala desa mengendalikan anggaran dan tidak ada pengawasan (Lazar dkk 2024) dan (Novryan

& Ilmar 2024). Selain itu, perbedaan kewarganegaraan antaraktor, relasi kuasa dengan elit lokal, dan konflik kepentingan dapat mempengaruhi penggunaan dana desa untuk kepentingan kelompok tertentu (Thareq & Apriani 2024). Ketidakseimbangan informasi dan kurangnya pengawasan publik memungkinkan pemimpin lokal untuk mengontrol proses pembangunan (Sutarna & Subandi 2023). Kurangnya pemahaman hukum dan partisipasi masyarakat juga menghambat dalam pencegahan korupsi dana desa (Kencana 2024).

Penguatan, pengawasan, transparansi, keterbukaan akses informasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencegah korupsi dana desa (Arasid, 2026). Peningkatan tata kelola desa tidak hanya memerlukan pengawasan penggunaan anggaran, tetapi juga perlu meningkatkan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa), meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, meningkatkan pengawasan pemerintah desa, dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk melihat bagaimana dana desa digunakan. Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, upaya ini penting untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arasid, M. I. (2026). Konsep Mitigasi Korupsi Dana Desa: Sebuah Kajian Literatur. *JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI*, 16(1), 56-68. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA/article/view/8540>
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (hlm. 241–258). New York: Greenwood Press.
- Delgado-Rodríguez, M., & Sillero-Arenas, M. (2018). Systematic review and meta-analysis. *Medicina Intensiva*, 42(7), 444–453. <https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.10.003>
- Gunawan, I., & Bahari, Y. (2024). Penyebab Tingginya Kasus Korupsi Dana Desa Dalam Sudut Pandang Teori Struktural Fungsional Talcot Parson (Study Literatur). *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 609-618. <https://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1190>
- Kencana, B. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 318-323. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/6157>
- Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa lamabelawa. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 8(2), 219-239. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/5345>
- Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Rifdan. (2021). Korupsi dana desa: Problematika otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 8(2). https://media.neliti.com/media/publications/525157-none-1aa74cd0.pdf?exp=1787383999&kid=1&sig=79O2uhSQspFzV6rLIRIT2fyap5vFMD9dbB_ejubNyJ4
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*,

- 6(7), e1000097.
<https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Novryan, R. A., & Ilmar, A. (2024). Kuasa Kepala Desa Atas Dana Desa di Desa Sodong Kabupaten Pandeglang. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7, 335-348.
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.3705>
- Suryawardani, S. W. F. P. Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dengan Pengelolaan Dana Desa (Kasus: Desa Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor). <https://ejournal-skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/1352/571>
- Sutarna, I. T., & Subandi, A. (2023). Korupsi Dana Desa Dalam Perspektif Principal-Agent. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 121-136.
<https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/52>
- Thareq, S. I., & Apriani, G. (2024). Dinamika Akuntabilitas Dana Desa Di Era Sustainable Development Goals. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 13(2), 198-208.
<https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/id/article/view/4770>
- Wiyanti, M. E., Soliha, S., Khalimy, A., & Dzikirullah, M. (2025). Analisa hukum korupsi APBDes dan penyalahgunaan kekuasaan kepala desa Ciwaringin Cirebon. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 30–44.
<https://doi.org/10.31764/jmk.v16i1.28796>